



The Role of Village Government in the Enviromental Restoration After Sidoarjo Mudflow Disaster

Peran Pemerintah Desa dalam Pemulihan Lingkungan Pasca Bencana Lumpur Sidoarjo

Lailul Mursyidah*, Isna Fitria Agustina, Hendra Sukmana

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

ABSTRACT

The Sidoarjo Mudflow disaster is an event of hot mud eruption that has heavy metal components that can pollute the soil, resulting in reduced soil fertility in areas near the Sidoarjo Mudflow disaster. The Sidoarjo Mudflow disaster has had a wide impact on the socio-economic life of residents and business activities in the surrounding area due to the damage to the environmental ecosystem after the disaster. The purpose of this study is to describe the role of the Ketapang village government in restoring the environmental ecosystem after the Sidoarjo mudflow disaster. This study uses a qualitative descriptive approach with data analysis techniques using interactive models including data collection, data reduction, data analysis and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Ketapang village government has played a role as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementer itself in development activities by involving various parties including village officials, traditional leaders, students, Babinsa, Babinkamtibmas and the Sidoarjo Regency Environmental and Sanitation Service (DLHK).

Keywords: Disaster Management, Environmental Recovery, Role of Government, Ketapang Village Government

ABSTRAK

Bencana semburan Lumpur Sidoarjo merupakan suatu peristiwa penyemburan lumpur panas yang memiliki komponen logam berat yang dapat mencemari tanah sehingga berakibat pada penyusutan kesuburan tanah di kawasan dekat bencana semburan Lumpur Sidoarjo. Bencana semburan Lumpur Sidoarjo telah berdampak luas pada kehidupan sosial ekonomi warga dan aktivitas usaha di sekitarnya dikarenakan rusaknya ekosistem lingkungan pasca bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa Ketapang dalam mengembalikan ekosistem lingkungan pasca bencana semburan lumpur sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Teknik analisis data menggunakan model interaktif meliputi pengumpulan data, reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Ketapang telah menjalankan peran sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri dalam kegiatan Pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya perangkat desa, tokoh adat, mahasiswa, Babinsa, Babinkamtibmas dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: Manajemen Bencana, Pemulihan Lingkungan, Peran Pemerintah, Pemerintah Desa Ketapang

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Sulikh Asmorowati

Reviewed by:

RD Kusyeni and Bambang
Kusbandrijo

*Correspondence:

Lailul Mursyidah
lailulmursyidah@umsida.ac.id

Published: 29 April 2025

Citation:

Mursyidah, L., Agustina, I. F.,
& Sukmana, H. (2025). *The
Role of Village Government in
the Enviromental Restoration
After Sidoarjo Mudflow
Disaster.*

JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik), 13:1.
doi: 10.21070/jkmp.v13i1.1792

PENDAHULUAN

Di era digital ini, pemerintahan diberbagai negara telah mengadopsi dan menggunakan Bencana semburan Lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak 2006 telah berdampak luas pada kehidupan sosial ekonomi warga dan aktivitas usaha di sekitarnya. Bencana semburan Lumpur Sidoarjo merupakan suatu peristiwa penyemburan lumpur panas yang memiliki komponen logam berat yang dapat mencemari tanah sehingga berakibat pada penyusutan kesuburan tanah di kawasan dekat semburan Lumpur Sidoarjo. Hingga tahun 2024, semburan Lumpur Sidoarjo belum dapat dihentikan sehingga berdampak pada transformasi lahan pertanian dan permukiman di sekitar area pengeboran menjadi tidak terkendali dan terus meluas (Cahyono, 2020).

Luapan semburan Lumpur Sidoarjo telah mencakup 11 desa di 3 Kecamatan di wilayah Sidoarjo. Terkait dengan hal tersebut pemerintah telah menetapkan peta zona terdampak agar memudahkan dalam pengendalian sosial masyarakat korban semburan Lumpur Sidoarjo melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam Peraturan Presiden tersebut ditetapkan bahwa luas lahan yang terdampak semburan Lumpur Sidoarjo mencapai 1.143,3 hektar dengan wilayah eksklusif PT. Lapindo sekitar 634,5 hektar (Astuti, 2021). Wilayah yang terkena dampak semburan Lumpur Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 1. Desa Yang Terdampak Lumpur Lapindo

Kec. Tanggulangin	Kec. Porong	Kec. Jabon
Desa Kedung Bendo	Desa Siring Timur	Desa Kedungcangkring
Desa Ketapang	Desa Jatirejo	Desa Pejarakan
Desa Gempolsari	Desa Mindi	Desa Besuki
Desa Kali Tengah	Desa Reno Kenongo	-

Sumber: Detiknews.com

Bencana semburan lumpur Sidoarjo juga menimbulkan dampak psikologis yang cukup besar bagi warga dikarenakan lingkungan sekitar terus berubah dan semakin tidak bersahabat. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, dan mereka enggan untuk pindah ke tempat yang lebih aman dengan meninggalkan rumah dan tanah mereka. Bahkan jika pemerintah telah memberikan kompensasi kepada warga yang terkena dampak, hal ini tidak dapat menggantikan kerugian yang telah terjadi. Banyak warga yang merasa kehilangan identitas dan terjebak karena mereka tidak lagi memiliki tempat untuk pergi ke tempat yang biasanya mereka tuju dan merasa seperti ditinggalkan. Pemerintah, industri, dan masyarakat umum harus bekerja sama untuk meminimalisir dampak dari bencana ini (Zubaidi, 2023).

Desa Ketapang sebagai salah satu desa terdampak yang terletak di Kecamatan Tanggulangin adalah satu-satunya desa yang masih ditinggali oleh penduduknya. Banyak bangunan di desa tersebut yang hanya memperlihatkan topografi yang terlihat di atas lumpur. Banyak warga Desa Ketapang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana ini. Sekitar 600 hektar lahan di Desa Ketapang terendam lumpur Sidoarjo sehingga menyebabkan hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian bagi banyak warga. Upaya pemulihan lahan perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan produktivitas lahan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Ketapang. Dalam status kepemilikan lokasi yang akan dipulihkan akibat lumpur Sidoarjo, Status kepemilikan lahan yaitu lahannya desa atau Lahan Tanah Kas Desa (TKD). Tanah Kas Desa (TKD) adalah tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh desa yang berasal dari kekayaan desa yang telah berlangsung lama, seperti warisan, pembelian, hibah, atau penguasaan fisik (Ayuningtyas, et al., 2018).



Pemerintah Desa bertanggungjawab akan ketersediaan lingkungan yang bersih dan sehat terhadap warganya. Desa diharapkan menjadi bagian terdepan dalam proses penyelamatan lingkungan dan menjaga citra asli yang telah melekat pada desa (Nur & Ali, 2021). Untuk mengurangi dampak sosial dan memperbaiki kawasan tersebut, pemerintah harus membuat rencana kebijakan untuk mengurangi ketidaknyamanan dan keresahan penduduk. Meskipun sulit dan membutuhkan penjelasan yang mendalam, salah satu pendekatan yang dapat dicoba adalah menerapkan gagasan pembangunan berkelanjutan (Suning, 2012).

Kegiatan pemulihan ekosistem lingkungan pasca bencana semburan lumpur Sidoarjo yang dilakukan pemerintah desa Ketapang merupakan bagian dari tugas pokok yang harus dijalankan. Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten unsur penyelenggaraan pemerintah desa (Nurcholis, 2005). Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004).

April 2025 / Volume 13 / Issue 1

tanah untuk pembangunan, serta menciptakan area baru untuk pembangunan, seperti taman, lapangan, atau jalan. Adapun kegiatan pengurukan lahan biasanya dilakukan untuk meratakan permukaan tanah yang tidak rata, menutup lubang atau galian di tanah, serta mempersiapkan lahan untuk pembangunan. (2) Pembangunan drainase. Dalam Pembangunan drainase ini sangat memiliki peran penting dalam mengurangi kemungkinan banjir, mengontrol permukaan air tanah, erosi tanah, dan mencegah kerusakan jalan dan struktur yang ada. Untuk memastikan pembangunan drainase berjalan dengan baik, perlu adanya persiapan dan pengaturan yang tepat, seperti pengambilan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kemajuan yang memadai sesuai dengan rincian program operasi yang telah disetujui oleh Tim teknis, serta pembersihan dan pemeliharaan saluran drainase. (3) Penanaman vegetasi. Kegiatan penanaman vegetasi ini merupakan kegiatan menanam tumbuhan di suatu area. Vegetasi dapat berupa pohon, semak, rumput, dan tanaman lainnya. Penanaman vegetasi memiliki banyak manfaat, antara lain melestarikan lingkungan, meningkatkan kualitas udara, menyediakan habitat bagi hewan, serta meningkatkan estetika lingkungan (Tafsir et al., 2022).



Gambar 2. Kegiatan Penanaman Tanaman Kembali

Sumber: Pemerintah Desa Ketapang (2024)

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketapang tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu yang pada awalnya semua tanaman di Desa Ketapang mati dikarenakan air sungai keruh akibat dampak semburan lumpur Sidoarjo dan berdampak pula pada lingkungan sekitar. Selain itu, mengakibatkan tanaman tidak bisa berkembang dan membuat budidaya perikanan mati. Melalui hambatan tersebut maka Pemerintah Desa Ketapang mengumpulkan beberapa stakeholder untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa Ketapang terutama mengembalikan sumber mata air akibat dampak semburan lumpur Sidoarjo dan mengembalikan prostruktur tanah.

Stakeholder dalam kegiatan pemulihan lahan ini dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pemulihan lahan di Desa Ketapang dan didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo. DLHK sebagai pihak yang paling mengetahui dampak mengenai lingkungan akibat dampak lumpur Sidoarjo ini. Upaya yang dilakukan dalam pemulihan lahan yang didukung oleh DLHK dengan memunculkan cairan yang memanfaatkan bahan organik yang nantinya dikembalikan ke tanah lagi demi mengembalikan ekosistem air. Berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah desa ketapang dalam pengembalian ekosistem lingkungan pasca bencana semburan lumpur sidoarjo merupakan wujud dari peran pemerintah desa dalam pembangunan yang disoroti dalam peran sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu (Siagian, 2000).

Sejumlah penelitian menjadi landasan penting dalam kajian ini, di antaranya menyoroti pentingnya regulasi lingkungan di tingkat desa yang belum terstruktur sesuai UU No. 32 Tahun 2009, sehingga upaya perlindungan lingkungan masih sebatas pernyataan Kepala Desa (Hidayah et al., 2021). Penelitian lain menunjukkan peran aktif pemerintah desa dalam pemulihan lahan pasca bencana melalui langkah darurat, gotong royong, dan klasifikasi bantuan berdasarkan ekonomi masyarakat, serta penegakan prinsip Maqasid al Syariah (Larissa et al., 2022). Selain itu, dampak luapan lumpur terbukti menyebabkan pencemaran

air dan tanah, biomagnifikasi logam berat, dan penurunan keanekaragaman hayati (Alfina et al., 2024). Adapun strategi penanganan kasus Lumpur Lapindo dinilai belum optimal karena kurangnya dukungan pemerintah dan masalah ganti rugi yang tidak sesuai kesepakatan (Mey Intakhiya et al., 2021).

Maka, dengan mendalami urgensi yang telah diuraikan diatas, penelitian ini mengacu ke beberapa studi terdahulu dan tujuan dari riset ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa melalui identifikasi beberapa faktor penghambat dan pendukung demi keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam pemulihan lahan sebagai bentuk pengembalian ekosistem lingkungan akibat dampak lumpur lapindo di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa dasar metode utamanya adalah wawancara dengan narasumber, yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan terkait rumusan masalah penelitian. Selain itu, data dikumpulkan dan fakta di lapangan dievaluasi, dengan penjelasan dari informan yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mencapai hasil dan kesimpulan (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan di Desa Ketapang Kabupaten Sidoarjo karena Desa Ketapang merupakan salah satu daerah yang terdampak bencana Lumpur Sidoarjo dengan fokus utama penelitian ini adalah peran pemerintah yang dilihat melalui indikator peran pemerintah sebagai (1) Stabilisator, (2) Innovator, (3) Modernisator, dan (4) Pelopor, (5) Pelaksana sendiri dalam kegiatan pembangunan (Nilawati et al., 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan informan kunci sekretaris desa ketapang, masyarakat, dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Sidoarjo, mahasiswa, bhabinsa, dan Babinsa, dan Babinkamtibmas. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan sesuai dengan tahapan yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2015), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa penelitian ini melakukan analisis dengan mengaitkan lima indikator Peran Pemerintah menurut Siagian (2006) dalam rangka pengembalian ekosistem lingkungan akibat dampak lumpur Sidoarjo dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut hasil yang didapatkan:

Peran Pemerintah dalam pengembalian ekosistem lingkungan akibat dampak lumpur Sidoarjo

1. Stabilisator

Peran pemerintah desa ketapang sebagai stabilisator yaitu mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam mengembalikan ekosistem lingkungan akibat dampak lumpur Sidoarjo agar ekosistem lingkungannya tetap terjaga. Peran sebagai stabilisator disini juga fokus pada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Ketapang dalam pengembalian ekosistem lingkungan akibat dampak bencana semburan lumpur Sidoarjo. Sosialisasi yang dilakukan merupakan sebagai salah satu bentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat serta untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan lahan sebagai bentuk pengembalian ekosistem lingkungan.

Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam upaya pemulihan lahan di Desa Ketapang dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya perangkat desa, tokoh adat, mahasiswa, Babinsa, Babinkamtibmas dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 3. Revegetasi Tanaman yang Melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas
Sumber: Pemerintah Desa Ketapang (2024)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peran Pemerintah Desa sebagai stabilisator ditunjukkan dengan Pemerintah Desa Ketapang yang senantiasa melibatkan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan yang ada di desa seperti yang disampaikan pada saat sosialisasi. Kegiatan pengembalian ekosistem lingkungan pasca bencana semburan lumpur Sidoarjo masih menjadi fokus Pembangunan oleh Pemerintah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mahasiswa dan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo karena berkaitan dengan pemulihan lingkungan.

Peran sebagai stabilisator juga dilakukan dengan menyediakan tenaga perawatan lahan dan pengalokasian anggaran. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Ketapang untuk honor tenaga perawatan yaitu 1 juta per-orang. Jadi apabila dihitung 1 bulan = 2 juta x 12 bulan = 24 juta. Sedangkan anggaran untuk pembelian pupuk organik setiap tahun sekitar 30 juta. Anggaran juga dialokasikan untuk perawatan pompa, pembelian bibit baru untuk mengganti bibit yang rusak dan pembuatan pupuk cair dari sampah.

Peran pemerintah Desa Ketapang sebagai stabilisator dalam mengembalikan ekosistem lingkungan dampak semburan lumpur Sidoarjo sudah sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Nugroho & Pradana (2021) terkait dengan pemerintah sebagai stabilisator yang mana Pemerintah Desa Ketapang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melibatkan stakeholder dalam kegiatan pengembalian ekosistem lingkungan serta mengalokasikan anggaran yang mendukung kegiatan pengembalian ekosistem lingkungan di Desa Ketapang pasca semburan Lumpur Sidoarjo.

Peran pemerintah sebagai stabilisator adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan (Siagian, 2006)

2. Inovator

Pemerintah Desa Ketapang sebagai innovator dalam pengembalian ekosistem lingkungan akibat dampak lumpur Sidoarjo yakni berkaitan dengan pengembalian konstruktur tanah dengan cara penggemburan tanah, pemberian pupuk organik dari limbah sampah rumah tangga dan melakukan penyiraman otomatis melalui fertigasi tetes. Pupuk organik dibuat dengan memisahkan sampah organik dan anorganik lalu dijadikan pupuk kompos. Perbaikan kualitas tanah dilakukan dengan memakai air endapan tanah yang ditampung pada wadah toren air yang kemudian dicampur dengan kandungan eko-lindi yang nantinya diaplikasikan melalui fegetasi tetes pada area lahan.



Gambar 4. Air Endapan Tanah Yang Dicampur Kandungan Eko-Lindi
Sumber: Pemerintah Desa Ketapang (2024)

Berdasarkan temuan dari wawancara bahwa peran Pemerintah Desa sebagai innovator sudah dirasa cukup baik, ditunjukkan dengan Pemerintah Desa yang berupaya mengembalikan ekosistem akibat dampak lumpur lapindo, yakni dengan perbaikan struktur dan kesuburan tanah untuk mendukung kehidupan tanaman dan mikroorganisme, selain itu juga melakukan perbaikan kualitas air yang dicampur dengan endapan eko-lindi lalu akan diamplikasikan melalui fegetasi tetes pada area lahan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pujiati & Gerry Katon (2023) yang mana peran pemerintah sebagai innovator ditunjukkan dengan melakukan hal-hal baru dalam kegiatan pengembalian ekosistem lahan dampak bencana semburan lumpur Sidoarjo. Peran pemerintah sebagai inovator yaitu pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja (Siagian, 2006).

3. Modernisator

Peran pemerintah desa Ketapang sebagai modernisator dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dengan pengembangan bakteri melalui cairan eko-lindi yang kemudian cairan ini akan disalurkan melalui selang-selang yang telah ditampung pada wadah toren, meskipun pemanfaatan teknologi ini dirasa masih kurang maksimal. Namun, penyaluran cairan ini tidak diberikan ke seluruh tanaman tetapi ke tanaman tertentu saja. Jika ada bibit tanaman yang mati akan diganti dengan bibit baru sesuai dengan kondisi tanah. Tanah yang masih bisa ditanami yaitu tanah yang tidak padat dan masih mengandung pH. Berdasarkan hasil temuan pada saat wawancara, secara keseluruhan pengembangan bakteri melalui cairan eko-lindi baru dilakukan oleh pemerintah desa Ketapang saja, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini masih belum optimal.

Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan Pasaribu et al. (2023) yang menunjukkan bahwa peran sebagai modernisator dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada meskipun masih dilakukan oleh pemerintah desa saja dalam pengembalian ekosistem dampak semburan lumpur Sidoarjo. Rendahnya partisipasi masyarakat dikarenakan dalam peran pemerintah sebagai modernisator diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan (Siagian, 2006).

4. Pelopor

Peran pemerintah sebagai pelopor dalam pengembalian ekosistem lingkungan akibat dampak bencana semburan lumpur Sidoarjo yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengembalian ekosistem lingkungan akibat dampak

bencana semburan lumpur Sidoarjo guna mencegah terjadinya hambatan dalam kegiatan pemulihan lahan ini.

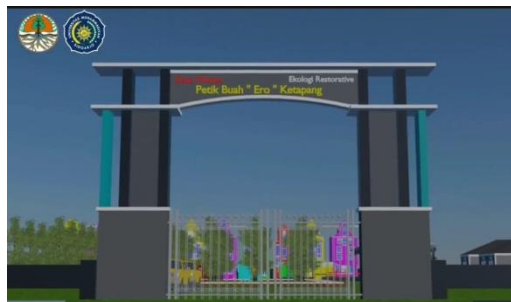
Selain itu, peran Pemerintah Desa sebagai pelopor yaitu mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam pengembalian ekosistem lingkungan dengan melakukan kegiatan pemberian pH yang cukup dengan diberikan formula cairan pupuk ekolindi untuk merangsang pH dalam tanah agar subur. Pemerintah desa juga mengajak masyarakat dalam kegiatan pemberian pupuk organik dengan perawatan yang maksimal, dan mengembalikan tanaman-tanaman yang bisa ditanam seperti tanaman trembesi yang dapat menyerap air agar tanaman bisa subur.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peran Pemerintah Desa sebagai pelopor ini sudah cukup baik dalam meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian dan pengembalian ekosistem lingkungan akibat dampak lumpur Sidoarjo dengan mengajak masyarakat untuk menanam pohon di sekitar lingkungan terutama penanaman pohon ketepeng serta memberikan kesadaran terhadap pentingnya pengembalian ekosistem lingkungan.

Peran pemerintah Desa Ketapang ini berbeda dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri & Sadad (2022) yang mana peran sebagai pelopor yaitu pemerintah desa masih gagal memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat sangat penting untuk keberlangsungan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Peran pemerintah sebagai pelopor harus menjadi role model bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara (Siagian, 2006).

5. Pelaksanaan Secara Mandiri Dalam Kegiatan Pembangunan Desa Ketapang

Proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketapang ini diawali dengan menciptakan strategi dan strategi implementasi yang berdasarkan keputusan tim kerja Desa Ketapang untuk mengkoordinasikan pembangunan desa dengan mengikuti kebijakan yang mendukung perkembangan masyarakat desa. Dalam menjalankan peran pelaksana sendiri dalam kegiatan Pembangunan, pemerintah Desa Ketapang membuat “Desa Wisata Ekologi Restorative Petik Buah “Ero” Ketapang”. Program ini merupakan program pemanfaatan lingkungan hidup dan peningkatan sumber daya alam. Proses pembangunan desa wisata akan terus dioptimalkan khususnya dalam pemasaran. Pembangunan desa wisata ini bekerjasama dengan perguruan tinggi local yang ada di Kabupaten Sidoarjo yaitu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan.



Gambar 5. Grand Desain Pembuatan Desa Wisata
Sumber: Pemerintah Desa Ketapang (2024)

Sebagai pelaksana sendiri dalam kegiatan Pembangunan, pemerintah desa Ketapang terbuka dalam menerima kritikan dan saran dari masyarakat yang digunakan untuk pengembangan desa wisata kedepannya. Harapan dari pemerintah desa Ketapang dengan adanya desa wisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Hal ini sejalan dengan penelitian Pombegi (2017) yang menunjukkan bahwa proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan menetapkan strategi dan rencana kerja untuk menyelaraskan pembangunan desa dan membangun masyarakat di sekitarnya. meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan

seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah (Siagian, 2006).

Faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa Ketapang dalam pengembalian ekosistem pasca bencana semburan lumpur Sidoarjo

Dalam tahap pelaksanaannya terdapat factor penghambat dalam pengembalian ekosistem pasca bencana semburan lumpur panas sidoarjo yaitu kondisi lahan yang masih kadang asin dan keruh serta kondisi lahan tanah padat dikarenakan unsur hara tanah yang rendah. Perkembangbiakan tanaman seperti pohon belimbing, alpukat dan kelengkeng masih sulit dan butuh waktu lama untuk penyesuaian. Saat ini tanaman yang dapat tumbuh masih pohon belimbing saja sedangkan tanaman lain belum dapat tumbuh meskipun proses penanaman sudah dimulai 1-1,5 tahun yang lalu dengan mekanisme perawatan yang sama.

Keterlibatan berbagai stakeholder diantaranya perangkat desa, masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menjadi factor pendukung dalam pengembalian ekosistem pasca bencana semburan lumpur sidoarjo. Selain itu, keterbukaan pemerintah desa Ketapang dalam menerima kritik dan masukan dalam kegiatan pengembalian ekosistem ini serta adanya anggaran dari Pemerintah Desa Ketapang sangat mendukung kesuksesan dalam pengembalian ekosistem pasca bencana semburan lumpur sidoarjo.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan, peran Pemerintah Desa Ketapang dalam pengembalian ekosistem lingkungan meliputi fungsi sebagai stabilisator dengan sosialisasi dan alokasi anggaran, innovator melalui perbaikan struktur tanah dan kualitas air, modernisator dengan pemanfaatan teknologi bakteri eko-lindi, pelopor dalam mengajak masyarakat menanam pohon dan meningkatkan kesadaran lingkungan, serta pelaksana yang merencanakan pembangunan desa wisata ekologi dan terbuka terhadap kritik masyarakat. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, aparat keamanan, masyarakat umum, mahasiswa, dan didukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah dengan memperluas keterlibatan pihak-pihak seperti media yang dapat menampung kritik dan usulan masyarakat serta meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam sosialisasi dan inovasi pengembalian ekosistem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian artikel ilmiah ini, khususnya Pemerintah Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.

REFERENCES

- Alfina, S. A., Zulfa, A., & Hendratmoko, A. F. (2024). Potensi Kerusakan Ekosistem sebagai Dampak Luapan Lumpur Lapindo: A Systematic Literature Review. *MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 281-287. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i4.1199>
- Astuti, R. S. (2021). Penataan Area Terdampak Lumpur Lapindo Ditargetkan Tuntas Tahun Ini. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/02/09/penataan-wilayah-terdampak-semburan-lumpur-ditargetkan-tuntas-tahun-ini>
- Ayuningtyas, V. I. (2018). Analisis Status Kepemilikan Tanah Aset Desa atau Tanah Kawasan Hutan Sebagai Permukiman (Studi pada Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162824>
- Pribadi, R. D., & Cahyono, B. K. (2020). Analisis Perubahan Penutup Lahan di Sekitar Area Terdampak Luapan Lumpur Lapindo. Tugas Akhir D3 Teknik Geomatika Universitas Gadjah Mada.
- Hidayah, N., & Ali, R. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 8(1), 113-123. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v8i1.21527>
- B., R., Larissa, D., & Hisbullah, H. (2022). Peran Pemerintah Desa terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(2), 393-402. Diambil dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/24732>
- Intakhiya, D. M., Santoso, U. P., & Mutiarin, D. (2021). Strategi dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur. *Jurnal MODERAT*, Volume 7, Nomor 3, 565-585. Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Nilawati, Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, Volume 2, Nomor 5, 1859-1873.
- Lobbu, D. N., Lengkong, F. D., & Pombengi, J. D. (2018). Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(49). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/18440>
- Pasaribu, J., Kurnianingsih, F., & Umrah, U. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Pulau Penyengat. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 26-41. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i1.40>
- Nuraini Syafitri, N. S., & Sadad, A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 81-91. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9301](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9301)
- Pasaribu, K., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2023). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(1), 38-46. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.609>
- Pujianti, P., & Gerry Katon, M. (2023). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 5(2), 171-185. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1457>
- Shofwan, M., & Agustina, R. (2023). Pola Sebaran Permukiman Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo. *COMPACT: Spatial Development Journal*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.35718/compact.v2i1.842>
- Sugiharto, B. (2006). 565 Hektar Lahan dan 11 Desa Ditenggelamkan Lumpur. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-946967/565-hektar-lahan-dan-11-desa-ditenggelamkan-lumpur>
- Suning, S. (2012). Dampak Lumpur Lapindo Terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Sidoarjo Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA*, 10(2), 45-53. <https://doi.org/10.36456/waktu.v10i2.865>
- Tri Ananda, O., Asmawati Azis, A., & Rachmawaty. (2022). Hubungan Antara Pengetahuan Ekosistem Dan Perubahan Lingkungan Dengan Sikap Peduli Lingkungan Peserta Didik. *Jurnal Biogenerasi*, 7(1), 206-216. <https://doi.org/10.30605/biogenerasi.v7i1.1721>
- Zubaidi, Z. (2023). Mengenang 5 Desa di Sidoarjo yang Hilang Terdampak Bencana Lumpur Lapindo. <https://jatimnow.com/baca-56186-mengenang-5-desa-di-sidoarjo-yang-hilang-terdampak-bencana-lumpur-lapindo>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Lailul Mursyidah, Isna Fitria Agustina, Hendra Sukmana. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.